



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 172 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan – Mojokerto – Surabaya - Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
34. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disusun berpedoman pada :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Agustus 2022

 BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

 
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 172

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 172 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

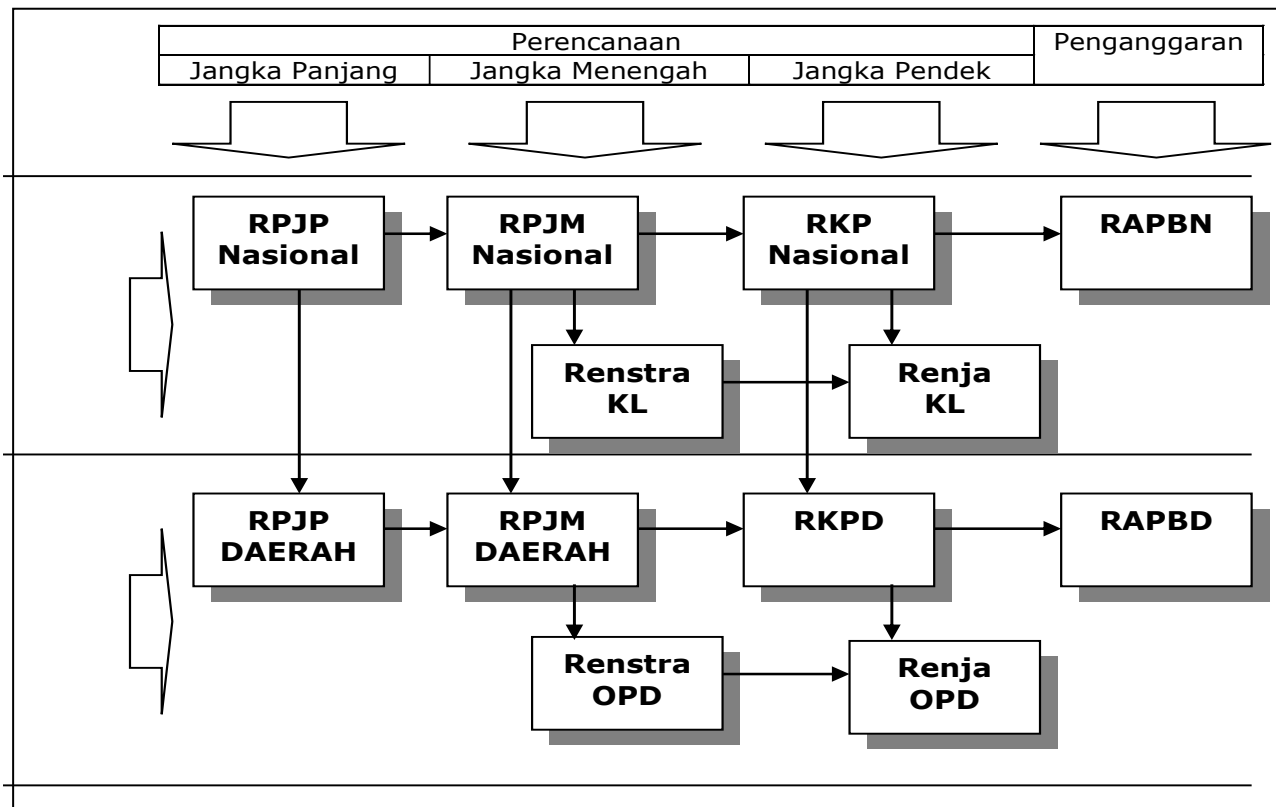
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Ruang lingkup Rencana Kerja (RENJA) adalah pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat

dicapai. RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan RENJA yang disusun menyesuaikan perubahan struktur organisasi perangkat daerah sehingga RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2026 dan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 2021-2026 harus disesuaikan, yang dijelaskan dengan diagram alir sebagai berikut:



Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025;
2. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023;
3. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2021 dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Target Kinerja;
4. Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi;
16. Permenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A (lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 77);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah sesuai dengan besarnya target baik kerja maupun kinerja Perangkat Daerah di Tahun 2023 dan alat ukur dalam melakukan evaluasi kinerja, pengkajian serta peningkatan kinerja Sekretariat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman dalam :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I. Pendahuluan**

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.5. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD (dituangkan saat RPJMD telah ditetapkan), Renja K/L, dan Renja Provinsi / Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.6. Landasan hukum

Memuat penjelasan tentang Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran Perangkat Daerah.

1.7. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan pembuatan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.8. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

- **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008. Jenis

indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. PD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya terdapat

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra OPD pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun capaian Kinerja Renja Tahun 2022 pada semester 1 secara fisik rata – rata mencapai 47,14% sedangkan untuk keuangan rata-rata mencapai 42,53% dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi SPJ masih dalam proses pembetulan.

Untuk perkiraan capaian pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 dimungkinkan juga ada kendala karena besarnya anggaran pada kegiatan yang bersumber dari dana DBHCHT yang memerlukan verifikasi dan validasi data khususnya penerima BLT pada kegiatan yang bersumber dari Dana DBHCHT.

Adapun pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1:

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mendukung tugas-tugas dan program-program lembaga Daerah dan meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah) Kabupaten Ngawi.

Untuk mengetahui secara jelas pencapaian kinerja **Sekretariat Daerah** Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel 2. 2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+2)	(n-2)	(n-1)	(n-2)	(n-1)	
1.	Persentase kebijakan strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu			NA	100%	100%	100%	NA	50%	100%	100%	
2.	Persentase kebijakan strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu			NA	100%	100%	100%	NA	50%	100%	100%	
3.	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu			NA	100%	100%	100%	NA	50%	100%	100%	

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- d. Koordinasi antar stakeholder yang baik
- e. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
- f. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melaksanakan review Rancangan awal RKPD merupakan proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan OPD yang terdapat perbedaan antara lain sesuai tabel :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Ngawi

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Ngawi	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	45,924,067,890	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Ngawi	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	35,257,534,761	
			Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai	100%				Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai	100%		
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Pemerintah Daerah dalam Setahun	100%				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Pemerintah Daerah dalam Setahun	100%		
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan kerumah tanggah sekretariat daerah	100%				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan kerumah tanggah sekretariat daerah	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Ngawi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	221,743,500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Ngawi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	66,778,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	188,210,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	33,243,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,051,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,052,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,790,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,790,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,262,500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,262,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4,640,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4,640,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	14,790,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	14,790,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Ngawi	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	18,880,150,111	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Ngawi	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	18,923,609,563	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Ngawi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/bulan	18,878,430,111	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Ngawi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/bulan	18,911,889,563
	Kab.Ngawi	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	28 Dokumen			Kab.Ngawi	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	28 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,930,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,930,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	7,790,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	7,790,000
		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 laporan				Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 laporan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Ngawi	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaian dalam setahun	100%	175,760,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Ngawi	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaian dalam setahun	100%	175,760,000
Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7 Paket	25,760,000	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7 Paket	25,760,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Ngawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	150,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Ngawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	150,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	1,908,966,896	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	2,122,302,896
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	199,116,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	199,116,700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	286,721,340	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	286,721,340
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	193,189,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	193,189,200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	199,987,756	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	199,987,756
	Kab.Ngawi	Jumlah barang yang digandakan	5000 Lembar			Kab.Ngawi	Jumlah barang yang digandakan	5000 Lembar	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	152,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	152,500,000
Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	293,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	321,500,000
	Kab.Ngawi	Jumlah mesin Kunjungan Tamu yang disediakan	5500 Kotak			Kab.Ngawi	Jumlah mesin Kunjungan Tamu yang disediakan	5500 Kotak	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	584,451,900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	869,287,900

	Kab. Ngawi	Jumlah mesin Rapat SKPD yang disediakan	2000 Kotak			Kab. Ngawi	Jumlah mesin Rapat SKPD yang disediakan	2000 Kotak		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	149 unit	6,774,323,108	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	149 unit	538,389,259	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	2,834,808,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2,805,576,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	
Pengadaan Mebel	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	138,500,000	Pengadaan Mebel	Kab. Ngawi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	138,500,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	995,439,108	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	389,889,259	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	4,377,805,500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	4,351,459,900	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	576 Laporan	2,649,053,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	576 Laporan	2,649,203,900	
	Kab. Ngawi	Jumlah penambahan daya listrik	-	-		Kab. Ngawi	Jumlah penambahan daya listrik	-	-	
	Kab. Ngawi	Jumlah pemasangan daya listrik	-	-		Kab. Ngawi	Jumlah pemasangan daya listrik	-	-	
	Kab. Ngawi	Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	-	-		Kab. Ngawi	Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	-	-	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	432 Laporan	1,351,152,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	432 Laporan	1,324,656,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	360 Laporan	377,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	360 Laporan	377,600,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	3,562,254,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	1,646,094,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Ngawi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	352,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Ngawi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	352,000,000	
	Kab. Ngawi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	1,806,010,000		Kab. Ngawi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	475,000,000	
Pemeliharaan Mebel	Kab. Ngawi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	25,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Ngawi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	25,000,000	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Ngawi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	224,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Ngawi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	133,650,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Ngawi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1,050,244,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Ngawi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	450,244,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	280,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	210,000,000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Ngawi	Prosentase Pemenuhan Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam setahun	100%	\$27,699,875	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Ngawi	Prosentase Pemenuhan Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam setahun	100%	794,240,743
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	227,699,875	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	194,240,743
	Kab.Ngawi	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	28 Orang/Bulan			Kab.Ngawi	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	28 Orang/Bulan	
	Kab.Ngawi	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disusun	12 Dokumen			Kab.Ngawi	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disusun	12 Dokumen	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-
	Kab.Ngawi	Jumlah Medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			Kab.Ngawi	Jumlah Medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 orang/bulan	600,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 orang/bulan	600,000,000
	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala Daerah	24 Dokumen			Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala Daerah	24 Dokumen	
FASILITASI KERUMAHTANGGAN SEKRETARIAT DAERAH	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi penyediaan kebutuhan kerumahtanggan sekretariat Daerah	300 laporan	3,629,663,400	FASILITASI KERUMAHTANGGAN SEKRETARIAT DAERAH	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi penyediaan kebutuhan kerumahtanggan sekretariat Daerah	300 laporan	2,363,010,400
	Kab.Ngawi	Jumlah Penyediaan kerumahtanggan sekretariat Daerah yang sesuai SOP	68 kali			Kab.Ngawi	Jumlah Penyediaan kerumahtanggan sekretariat Daerah yang sesuai SOP	68 kali	
	Kab.Ngawi	Jumlah Penyediaan Akomodasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang disediakan	45 kali			Kab.Ngawi	Jumlah Penyediaan Akomodasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang disediakan	45 kali	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1,795,183,400	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1,752,258,400

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	1,834,480,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	608,752,000
PENATAAN ORGANISASI	Kab.Ngawi	Jumlah dokumen kajian bidang kelembagaan dan analisis jabatan yang di susun	2 Dokumen	1,527,822,000	PENATAAN ORGANISASI	Kab.Ngawi	Jumlah dokumen kajian bidang kelembagaan dan analisis jabatan yang di susun	2 Dokumen	1,176,423,000
	Kab.Ngawi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti	39 Laporan			Kab.Ngawi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti	39 Laporan	
	Kab.Ngawi	Persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75	100%			Kab.Ngawi	Persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75	100%	
	Kab.Ngawi	Jumlah dokumen kajian bidang pelayanan publik dan tatalaksanaan yang disusun	5 Dokumen			Kab.Ngawi	Jumlah dokumen kajian bidang pelayanan publik dan tatalaksanaan yang disusun	5 Dokumen	
	Kab.Ngawi	Jumlah dokumen kajian bidang kinerja dan RB yang disusun	4 Dokumen			Kab.Ngawi	Jumlah dokumen kajian bidang kinerja dan RB yang disusun	4 Dokumen	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	400,000,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	337,087,500
	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	10 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	10 Kali	
	Kab.Ngawi	Jumlah Rapat Koordinasi penyusunan kajian yang dilaksanakan	8 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah Rapat Koordinasi penyusunan kajian yang dilaksanakan	8 Kali	
	Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 Kali	
	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-			Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	
Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	10 Kali	275,000,000	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	10 Kali	224,998,500
	Kab.Ngawi	Jumlah Rapat Koordinasi penyusunan kajian yang dilaksanakan	10 kali			Kab.Ngawi	Jumlah Rapat Koordinasi penyusunan kajian yang dilaksanakan	10 kali	
	Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 Kali	
	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan			Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	500,000,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	324,420,000
	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	10 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	10 Kali	
	Kab.Ngawi	Jumlah Rapat Koordinasi penyusunan kajian yang dilaksanakan	8 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah Rapat Koordinasi penyusunan kajian yang dilaksanakan	8 Kali	
	Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3 Kali	

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	225,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	182,095,000
	Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	8 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	8 kali	
	Kab. Ngawi	Jumlah rapat koordinasi penyusunan kajian yang dilaksanakan	5 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah rapat koordinasi penyusunan kajian yang dilaksanakan	5 kali	
	Kab. Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali			Kab. Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	127,822,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	107,822,000
	Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	5 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	5 kali	
PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti	195 Laporan	4,027,879,500	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti	195 Laporan	3,101,467,000
	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang sesuai SOP	195 Laporan			Kab. Ngawi	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang sesuai SOP	195 Laporan	
	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan penyediaan akomodasi pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang sesuai standart	105 Laporan			Kab. Ngawi	Jumlah Laporan penyediaan akomodasi pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang sesuai standart	105 Laporan	
Fasilitasi Keprotokolalan	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolalan	4 laporan	866,272,000	Fasilitasi Keprotokolalan	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolalan	4 laporan	717,179,500
	Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi fasilitasi keprotokolalan yang dilaksanakan	70 kali			Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi fasilitasi keprotokolalan yang dilaksanakan	70 kali	
	Kab. Ngawi	Jumlah Fasilitasi Keprotokolalan yang sesuai SOP dalam setiap acara	70 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah Fasilitasi Keprotokolalan yang sesuai SOP dalam setiap acara	70 Kali	
	Kab. Ngawi	Jumlah Penyediaan Akomodasi fasilitasi keprotokolalan yang sesuai standart	40 kali			Kab. Ngawi	Jumlah Penyediaan Akomodasi fasilitasi keprotokolalan yang sesuai standart	40 kali	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	2,283,368,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	1,506,048,000
	Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	70 kali			Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	70 kali	
	Kab. Ngawi	Jumlah Fasilitasi komunikasi pimpinan yang sesuai SOP dalam setiap acara	70 kali			Kab. Ngawi	Jumlah Fasilitasi komunikasi pimpinan yang sesuai SOP dalam setiap acara	70 kali	
	Kab. Ngawi	Jumlah Penyediaan Akomodasi fasilitasi komunikasi pimpinan yang sesuai standart	40 kali			Kab. Ngawi	Jumlah Penyediaan Akomodasi fasilitasi komunikasi pimpinan yang sesuai standart	40 kali	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	878,239,500	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	878,239,500

	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi pendokumentasian tugas pimpinan yang dilaksanakan	70 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi pendokumentasian tugas pimpinan yang dilaksanakan	70 Kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah pendokumentasian tugas pimpinan yang sesuai SOP dalam setiap acara	70 kali			Kab.Ngawi	Jumlah pendokumentasian tugas pimpinan yang sesuai SOP dalam setiap acara	70 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah Penyediaan Akomodasi pendokumentasian tugas pimpinan yang sesuai standart	40 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah Penyediaan Akomodasi pendokumentasian tugas pimpinan yang sesuai standart	40 Kali		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab.Ngawi	Persentase kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti perangkat daerah yang terkait	100%	9,176,686,825	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab.Ngawi	Persentase kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti perangkat daerah yang terkait	100%	8,899,010,825	
	Kab.Ngawi	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah terkait	90%			Kab.Ngawi	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah terkait	90%		
	Kab.Ngawi	Persentase produk hukum daerah yang di tetapkan sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	85%			Kab.Ngawi	Persentase produk hukum daerah yang di tetapkan sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	85%		
ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen administrasi pemerintahan yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	1,230,429,000	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen administrasi pemerintahan yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	943,446,500	
	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti	90 kali			Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti	90 kali		
	Kab.Ngawi	Persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai Minimal 75	85%			Kab.Ngawi	Persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai Minimal 75	85%		
	Kab.Ngawi	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mendapatkan nilai minimal 75	85%			Kab.Ngawi	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mendapatkan nilai minimal 75	85%		
	Kab.Ngawi	Jumlah Patok perbatasan yang terpasang	25 patok			Kab.Ngawi	Jumlah Patok perbatasan yang terpasang	25 patok		
	Kab.Ngawi	Jumlah sistem informasi pengukuran kinerja kecamatan yang dihasilkan	1 Aplikasi			Kab.Ngawi	Jumlah sistem informasi pengukuran kinerja kecamatan yang dihasilkan	1 Aplikasi		
Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	228,357,000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	95,871,500	
	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan	10 kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan	10 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	5 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	5 Kali		
Pengetahuan Administrasi Kewilayahan	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	595,075,000	Pengetahuan Administrasi Kewilayahan	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	481,835,000	

	Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi pengelolaan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan	10 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi pengelolaan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan	10 Kali		
	Kab. Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	10 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	10 Kali		
	Kab. Ngawi	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	1 kali			Kab. Ngawi	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	1 kali		
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	406,997,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	365,740,000	
	Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang otonomi daerah yang dilaksanakan	10 kali			Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang otonomi daerah yang dilaksanakan	10 kali		
	Kab. Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 Kali		
	Kab. Ngawi	Jumlah sosialisasi pelaksanaan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan	3 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah sosialisasi pelaksanaan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan	3 Kali		
	Kab. Ngawi	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	2 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	2 Kali		
PELAKSANAAN KEBUJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Ngawi	Jumlah laporan hasil fasilitasi kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	12 laporan	5,860,354,500	PELAKSANAAN KEBUJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Ngawi	Jumlah laporan hasil fasilitasi kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	12 laporan	4,345,435,500	
	Kab. Ngawi	Persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75	80%			Kab. Ngawi	Persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75	80%		
	Kab. Ngawi	Jumlah laporan hasil koordinasi program bantuan sosial yang ditindaklanjuti	5 laporan			Kab. Ngawi	Jumlah laporan hasil koordinasi program bantuan sosial yang ditindaklanjuti	5 laporan		
	Kab. Ngawi	Jumlah laporan hasil koordinasi program penanggulangan kemiskinan yang ditindaklanjuti	3 laporan			Kab. Ngawi	Jumlah laporan hasil koordinasi program penanggulangan kemiskinan yang ditindaklanjuti	3 laporan		
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	3,390,694,500	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	3,875,775,500	
	Kab. Ngawi	Jumlah rapat koordinasi hari besar keagamaan	15 kali			Kab. Ngawi	Jumlah rapat koordinasi hari besar keagamaan	15 kali		
	Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi bina mental spiritual yang dilaksanakan	10 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi bina mental spiritual yang dilaksanakan	10 kali		
	Kab. Ngawi	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	5 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	5 Kali		
	Kab. Ngawi	Jumlah Fasilitasi bagi Lembaga Keagamaan	18 kali			Kab. Ngawi	Jumlah Fasilitasi bagi Lembaga Keagamaan	18 kali		

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	290,200,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	290,200,000	
		Kab. Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi program bantuan sosial yang dilaksanakan	5 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi program bantuan sosial yang dilaksanakan	5 Kali		
		Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	5 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	5 Kali		
		Kab. Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Urmas	1 Dokumen	32,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Urmas	1 Dokumen	32,000,000	
		Kab. Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan	5 kali			Kab. Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan	5 kali		
		Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	5 kali			Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	5 kali		
		Kab. Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali		
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Ngawi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	73,730,000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Ngawi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	73,730,000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Ngawi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10 Keluarga	73,730,000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Ngawi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10 Keluarga	73,730,000	
	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Kab. Ngawi	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang di fasilitasi, sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	125 produk hukum	1,609,387,825	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Kab. Ngawi	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang di fasilitasi, sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	125 produk hukum	1,239,228,325	
		Kab. Ngawi	Jumlah laporan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	51 laporan			Kab. Ngawi	Jumlah laporan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	51 laporan		
		Kab. Ngawi	Persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75	75%			Kab. Ngawi	Persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75	75%		

	Kab.Ngawi	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mendapatkan nilai minimal 75	75%			Kab.Ngawi	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mendapatkan nilai minimal 75	75%		
	Kab.Ngawi	Jumlah fasilitasi bantuan hukum yang ditindaklanjuti	3 laporan			Kab.Ngawi	Jumlah fasilitasi bantuan hukum yang ditindaklanjuti	3 laporan		
	Kab.Ngawi	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan	285 Dokumen			Kab.Ngawi	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan	285 Dokumen		
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	122 Dokumen	1,323,387,825	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	122 Dokumen	1,030,688,325	
	Kab.Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	20 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	20 Kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	15 kali			Kab.Ngawi	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	15 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 Kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	-			Kab.Ngawi	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	-		
Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab.Ngawi	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-	202,000,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab.Ngawi	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-	148,788,000	
	Kab.Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	10 kali			Kab.Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	10 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	15 kali			Kab.Ngawi	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	15 kali		
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab.Ngawi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 dokumen	84,000,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab.Ngawi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 dokumen	59,752,000	
	Kab.Ngawi	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	3 kali			Kab.Ngawi	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	3 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	7 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	7 Kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali		
FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti	24 Kali	476,515,500	FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti	24 Kali	370,900,500	
	Kab.Ngawi	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mendapatkan nilai minimal 75	85%			Kab.Ngawi	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mendapatkan nilai minimal 75	85%		
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	476,515,500	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	370,900,500	
	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	10 kali			Kab.Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	10 kali		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab.Ngawi	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRB	100%	4,853,768,000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab.Ngawi	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRB	100%	3,841,399,500	

	Kab. Ngawi	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti perangkat daerah	100%			Kab. Ngawi	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti perangkat daerah	100%		
	Kab. Ngawi	Indeks kematangan Pengadaan Barang Jasa	4 level			Kab. Ngawi	Indeks kematangan Pengadaan Barang Jasa	4 level		
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	50 laporan	1,033,326,500	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	50 laporan	720,326,500	
	Kab. Ngawi	Jumlah Hasil Rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	25 kali			Kab. Ngawi	Jumlah Hasil Rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	25 kali		
	Kab. Ngawi	Jumlah dokumen kajian bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	2 Dokumen			Kab. Ngawi	Jumlah dokumen kajian bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	2 Dokumen		
	Kab. Ngawi	persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75	80%			Kab. Ngawi	persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75	80%		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi kebijakan BUMD dan BLUD	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	432,326,500	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi kebijakan BUMD dan BLUD	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	232,326,500	
	Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang dilaksanakan	10 kali			Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang dilaksanakan	10 kali		
	Kab. Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	5 kali			Kab. Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	5 kali		
	Kab. Ngawi	Jumlah sosialisasi/ pembinaan/ bimtek bidang pengelolaan BUMD dan BLUD yang dilaksanakan	2 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah sosialisasi/ pembinaan/ bimtek bidang pengelolaan BUMD dan BLUD yang dilaksanakan	2 Kali		
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 laporan	300,000,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 laporan	227,000,000	
	Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	5 kali			Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	5 kali		
	Kab. Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	5 kali			Kab. Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	5 kali		
	Kab. Ngawi	Jumlah kajian bidang pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	-			Kab. Ngawi	Jumlah kajian bidang pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	-		
	Kab. Ngawi	Jumlah sosialisasi/ pembinaan bidang pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	2 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah sosialisasi/ pembinaan bidang pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	2 Kali		
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	157,000,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	147,000,000	

	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	10 kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	10 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	5 kali			Kab.Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	5 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah kajian bidang ekonomi mikro kecil yang dilaksanakan	-			Kab.Ngawi	Jumlah kajian bidang ekonomi mikro kecil yang dilaksanakan	-		
	Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi/ pembinaan bidang ekonomi yang dilaksanakan	-			Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi/ pembinaan bidang ekonomi yang dilaksanakan	-		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pembentukan BLUD	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	144.000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pembentukan BLUD	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	114.000,000	
	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan evaluasi pembentukan BLUD yang dilaksanakan	5 kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan evaluasi pembentukan BLUD yang dilaksanakan	5 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	4			Kab.Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	4		
	Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi/ pembinaan/ bimtek bidang pembentukan BLUD yang dilaksanakan	-			Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi/ pembinaan/ bimtek bidang pembentukan BLUD yang dilaksanakan	-		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pendirian BUMD	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pendirian BUMD	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	-	
	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan evaluasi pendirian BUMD yang dilaksanakan	5 kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan evaluasi pendirian BUMD yang dilaksanakan	5 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 kali			Kab.Ngawi	Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi/ pembinaan/ bimtek bidang pendirian BUMD yang dilaksanakan	1 kali			Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi/ pembinaan/ bimtek bidang pendirian BUMD yang dilaksanakan	1 kali		
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti	93 laporan	1.373,647,000	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti	93 laporan	1.161,707,000	
	Kab.Ngawi	Jumlah dokumen administrasi pembangunan yang disusun	5 dokumen			Kab.Ngawi	Jumlah dokumen administrasi pembangunan yang disusun	5 dokumen		
	Kab.Ngawi	persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75	100%			Kab.Ngawi	persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai minimal 75	100%		
	Kab.Ngawi	persentase peserta bimbingan teknis yang mendapatkan nilai minimal 75	100%			Kab.Ngawi	persentase peserta bimbingan teknis yang mendapatkan nilai minimal 75	100%		
	Kab.Ngawi	Jumlah sistem informasi administrasi pembangunan yang di hasilkan	1 aplikasi			Kab.Ngawi	Jumlah sistem informasi administrasi pembangunan yang di hasilkan	1 aplikasi		
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	420.516,000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	420.516,000	
	Kab.Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 kali			Kab.Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	5 kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	5 kali		

	Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi yang di laksanakan	2 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi yang di laksanakan	2 Kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	1 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	1 Kali		
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 laporan	675,750,000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 laporan	463,810,000	
	Kab.Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	15 kali			Kab.Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	15 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi yang di laksanakan	2 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah sosialisasi yang di laksanakan	2 Kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	1 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	1 Kali		
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4Laporan	277,381,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4Laporan	277,381,000	
	Kab.Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	15 kali			Kab.Ngawi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	15 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	10 kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	10 kali		
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Kab.Ngawi	Persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai Minimal 75	85%	1,944,794,500	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Kab.Ngawi	Persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan nilai Minimal 75	85%	1,497,491,500	
	Kab.Ngawi	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mendapatkan nilai minimal 75	80%			Kab.Ngawi	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mendapatkan nilai minimal 75	80%		
	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti	150 kali			Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti	150 kali		
	Kab.Ngawi	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	100%			Kab.Ngawi	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	100%		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	1,460,794,500	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	1,057,316,000	
	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	150 kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	150 kali		
	Kab.Ngawi	Jumlah pemberian honorarium pengelolaan barang/jasa	290 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah pemberian honorarium pengelolaan barang/jasa	290 kali		
	Kab.Ngawi	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya,yang ditandatangani pada kuartal pertama	5%			Kab.Ngawi	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya,yang ditandatangani pada kuartal pertama	5%		
	Kab.Ngawi	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	25 nilai rasio			Kab.Ngawi	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	25 nilai rasio		
Pengelolaan Layanan pengadaan secara Elektronik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	155,000,000	Pengelolaan Layanan pengadaan secara Elektronik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	130,605,000	
	Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	10 Kali			Kab.Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	10 Kali		

	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Ngawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang	329,000,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Ngawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang	300,570,500
		Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali	
		Kab. Ngawi	Kematangan UKPB mencapai level proaktif	9 Indikator			Kab. Ngawi	Kematangan UKPB mencapai level proaktif	9 Indikator	
	PEMANTAUAN KEBUAKAN SUMBER DAYA ALAM	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Kebijakan Bidang SDA dan Energi yang ditindaklanjuti	2 dokumen	502,000,000	PEMANTAUAN KEBUAKAN SUMBER DAYA ALAM	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Kebijakan Bidang SDA dan Energi yang ditindaklanjuti	2 dokumen	461,874,500
		Kab. Ngawi	Jumlah Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang SDA dan Energi yang ditindaklanjuti	34 laporan			Kab. Ngawi	Jumlah Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang SDA dan Energi yang ditindaklanjuti	34 laporan	
		Kab. Ngawi	Jumlah Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti	30 kali			Kab. Ngawi	Jumlah Hasil Rapat Koordinasi yang ditindaklanjuti	30 kali	
		Kab. Ngawi	Persentase peserta Sosialisasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang SDA dan Energi dengan kategori paham (nilai minimal 75)	3 kali			Kab. Ngawi	Persentase peserta Sosialisasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang SDA dan Energi dengan kategori paham (nilai minimal 75)	3 kali	
		Kab. Ngawi	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi yang ditindaklanjuti	15 laporan			Kab. Ngawi	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi yang ditindaklanjuti	15 laporan	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	164,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	153,874,500
		Kab. Ngawi	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	5 Laporan			Kab. Ngawi	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	5 Laporan	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	98,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	98,000,000
		Kab. Ngawi	Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	5 Laporan			Kab. Ngawi	Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	5 Laporan	
		Kab. Ngawi	Jumlah Sosialisasi kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	1 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah Sosialisasi kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	1 Kali	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	240,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	210,000,000
		Kab. Ngawi	Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	5 laporan			Kab. Ngawi	Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	5 laporan	
		Kab. Ngawi	Jumlah Sosialisasi kebijakan energi dan Air yang dilaksanakan	2 Kali			Kab. Ngawi	Jumlah Sosialisasi kebijakan energi dan Air yang dilaksanakan	2 Kali	
			TOTAL PAGU		59,954,522,715			TOTAL PAGU		46,997,945,086

2.4. Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan yang ada pada **Sekretariat Daerah** Kabupaten Ngawi mendasar atas usulan dari pemangku kepentingan masing-masing bidang.

Dari usulan program dan kegiatan tersebut mengacu pada isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari **Sekretariat Daerah** Kabupaten Ngawi.

Tabel 2.5
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Ngawi

Nama PD :

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			N I H I L		

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat fungsi koordinasi, Sekretariat Daerah memiliki peranan sebagai Koordinator semua Perangkat Daerah dalam melaksanakan Tugas Fungsinya.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 yang disusun merupakan proses yang harus dilaksanakan agar Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra dapat tercapai.

Adapun tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Renja

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

2. Sasaran Renja

a. Meningkatnya Implementasi Sakip Perangkat Daerah

b. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

c. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 mengacu pada Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi periode 2021 – 2026.

Adapun Tabel rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Ngawi

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01		SEKRETARIAT DAERAH												
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
4 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	0 Dokumen	80.15 Nilai	33,243,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	37,000,000
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	1 Dokumen	80.15 Nilai	4,052,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	36,500,000
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	1 Dokumen	80.15 Nilai	4,790,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	36,500,000
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	2 Dokumen	80.15 Nilai	5,262,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	37,000,000
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	2 Dokumen	80.15 Nilai	4,640,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	36,500,000
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	7 Laporan	80.15 Nilai	14,790,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	39,334,000
4 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang di susun	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	25 Dokumen	80.15 Nilai	18,911,889,563	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	19,101,008,459

Kode	Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolek Ukur	Target	
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai LHE AOP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	100 %	1 Laporan 0 Laporan	80,15 Nilai	3.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	1.500,000	
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai LHE AOP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	100 %	30 Laporan	80,15 Nilai	7.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	11.000,000	
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								175.760,000				510,000,000	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai LHE AOP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	100 %	7 Paket	80,15 Nilai	25.760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	310,000,000	
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai LHE AOP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	100 %	60 Orang	80,15 Nilai	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	200,000,000	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.122.302,896				2.103,000,000	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai LHE AOP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	100 %	1 Paket	80,15 Nilai	199.116,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	200,000,000	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Perakitan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai LHE AOP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	100 %	2 Paket	80,15 Nilai	286.721,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	200,000,000	
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai LHE AOP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	100 %	4 Paket	80,15 Nilai	193.189,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang ususan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	200,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.05 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Barang yang digandakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai LHE A/RP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	5000 Lembar 2 Paket	80,15 Nilai	199.987,756	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	325.000,000	
4 01 01 2.05 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Nilai LHE A/RP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	5 Dokumen	80,15 Nilai	152.500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	200.000,000	
4 01 01 2.05 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu yang disediakan	Nilai LHE A/RP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	0 Laporan 4 Laporan 5500 Kotak	80,15 Nilai	221.500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	50.000,000	
4 01 01 2.05 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Makanan dan Minuman Rapat SKPD yang di sediakan	Nilai LHE A/RP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	60 Laporan 2000 Kotak	80,15 Nilai	969.287,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	926.000,000	
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								538.385,259				4.760.000,000	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nilai LHE A/RP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	50 Unit	80,15 Nilai	138.500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	200.000,000	
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai LHE A/RP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	38 Unit	80,15 Nilai	389.885,259	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	300.000,000	
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai LHE A/RP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	5 Unit	80,15 Nilai	10.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	200.000,000	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4.351.459,500				4.220.558,161	

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah iklan/Publikasi media cetak dan Elektronik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Pemisahan Daya Listrik Jumlah Penambahan daya listrik	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	0 Kali 576 Laporan 0 Tdk 0 KWH	80.15 Nilai	2.649,203,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	2.800,558,161
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	432 Laporan	80.15 Nilai	1.324,656,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	1.042,400,000
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	160 Laporan	80.15 Nilai	377,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	375,600,000
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Sarang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,646,094,000					6,351,985,000
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pagaknya	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	32 Unit	80.15 Nilai	352,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	200,000,000
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	66 Unit	80.15 Nilai	475,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	350,000,000
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	25 Unit	80.15 Nilai	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	100,000,000
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	245 Unit	80.15 Nilai	133,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	120,985,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Telok Ukur	Target	
4 01 01 2.09 09	Pereliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	2 Unit	80.15 Nilai	450,264,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	5,451,000,000
4 01 01 2.09 10	Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	3 Unit	80.15 Nilai	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	130,000,000
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								794,240,743					794,239,365
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	28 Orang/Bulan	80.15 Nilai	194,240,743	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	194,239,365
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	24 Dokumen 0 Orang/Bulan	80.15 Nilai	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	600,000,000
4 01 01 2.12	fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah								2,961,010,400					2,500,000,000
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan kerumah tanggan sekretariat daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	4 Paket	80.15 Nilai	1,752,258,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan kerumah tanggan sekretariat daerah	100 %	1,050,000,000
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan kerumah tanggan sekretariat daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	4 Paket	80.15 Nilai	608,752,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan kerumah tanggan sekretariat daerah	100 %	550,000,000
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi								1,176,423,000					1,552,822,800

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Page Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Page Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Telok Ukur	Target	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi penyusunan Kajian yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Strategi bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	2 Dokumen 10 Kali 6 Kali 2 Kali	100 Persentase	337.087.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai	100 %	405.000.000	
4.01.01.2.13.02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Strategi bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	10 Kali 2 Laporan 10 Kali 2 Kali	100 Persentase	224.998.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai	100 %	280.000.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Strategi bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	2 Dokumen 10 Kali 6 Kali 3 Kali	100 Persentase	324.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai	100 %	480.000.000	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Strategi bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	1 Dokumen 6 Kali 5 Kali 2 Kali	100 Persentase	182.095.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai	100 %	250.000.000	

Kode	Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Kebaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Kebaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.13.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan yang disusun	Persentase Kebijakan Strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	1 Dokumen 5 Kab 2 Laporan	100 Persentase	107.822,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai	100 %	137.822,800	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								3.101.467,000				4.102.879,000	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pemenuhan Perundang Usuan, Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Pemerintah Daerah dalam Setahun	Jumlah Fasilitas Keprotokolan yang sesuai SOP dalam setiap acara Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Fasilitas Keprotokolan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan Jumlah Penyediaan Akomodasi Fasilitas Keprotokolan yang sesuai standart	Persentase Kebijakan Strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	70 Kali 70 Kali 4 Laporan 40 Kali	100 Persentase	717.179,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perundang Usuan, Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Pemerintah Daerah dalam Setahun	100 %	1.135.676,907	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Perundang Usuan, Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Pemerintah Daerah dalam Setahun	Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang sesuai SOP dalam setiap Acara Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan Jumlah Penyediaan Akomodasi Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang sesuai standart	Persentase Kebijakan Strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	70 kali 70 kali 4 Laporan 40 kali	100 Persentase	1.506.048,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perundang Usuan, Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Pemerintah Daerah dalam Setahun	100 %	1.943.533,782	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Pemerintah Daerah dalam Setahun	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pendokumentasian tugas pimpinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Pendokumentasian tugas pimpinan yang sesuai SOP dalam setiap Acara Jumlah Penyediaan Akomodasi Pendokumentasian tugas Pimpinan yang sesuai Standar	Persentase Kebijakan Strategis bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	70 Kali 4 Laporan 70 Kali 40 Kali	100 Persentase	878.239.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Pemerintah Daerah dalam Setahun	100 %	1.023.688.311
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								6.899.010.825				7.226.688.000	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan								943.446.500				1.247.929.500	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti perangkat daerah yang terkait	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Persentase kebijakan strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	2 Dokumen 10 Kali 5 Kali	100 Persentase	95.871.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti perangkat daerah yang terkait	100 %	242.007.750
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti perangkat daerah yang terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Administrasi Kewilayahan yang dilaksanakan Jumlah Pemasangan Patok Perbatasan Jumlah Pemasangan Titik Perbatasan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Persentase kebijakan strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	2 Dokumen 10 Kali 10 Patok 10 Titik 10 Kali	100 Persentase	481.835.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti perangkat daerah yang terkait	100 %	602.571.900

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti perangkat daerah yang terkait	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Otonomi daerah yang dilaksanakan Jumlah Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi bidang Otonomi Daerah yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Persentase kebijakan strategi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	3 Kali 2 Kali 1 Dokumen 10 Kali 6 Kali	100 Persentase	355.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti perangkat daerah yang terkait	100 %	403.346.250
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					4,345,435,500				3,860,353,250			
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah terkait	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Fasilitasi Bagi Lembaga Keagamaan Jumlah Koordinasi dan konsultasi bina mental spiritual yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi hari besar keagamaan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 %	0 Dokumen 1 Dokumen 18 Kali 10 Kali 15 Kali 5 Kali	100 Persentase	3.875.775.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah terkait	95 %	3.107.353.250

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Profiliran Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.02.2.02.02	Relaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah terkait	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan K4 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah rapat koordinasi Program Bantuan Sosial yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 %	1 Dokumen 5 Kali 5 Kali 1 Kali	100 Persentase	290.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah terkait	95 %	300.000.000	
4.01.02.2.02.03	Relaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah terkait	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Keagamaan, Transibum Unmas Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 %	1 Dokumen 5 Kali 5 Kali 1 Kali	100 Persentase	32.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah terkait	95 %	33.000.000	
4.01.02.2.02.04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah terkait	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Kebijakan Strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 %	10 Keluarga	100 Persentase	73.730.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah terkait	95 %	210.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.02.2.03.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah terkait	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Kebijakan Strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	95 %	10 Keluarga	100 Persentase	73,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah terkait	95 %	210,000,000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							1,239,228,325						1,634,389,750
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum daerah yang di tetapkan sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Jumlah Bimbingan Teknis Yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	90 %	0 Kali 15 kali 0 Dokumen 122 Dokumen 20 Kali 4 Kali	100 Persentase	1,030,688,325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produk hukum daerah yang di tetapkan sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	90 %	1,403,216,150
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase produk hukum daerah yang di tetapkan sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	90 %	0 Kasus 10 Kasus 15 Kali 10 Kali	100 Persentase	148,788,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produk hukum daerah yang di tetapkan sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	90 %	111,329,700
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang di tetapkan sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	90 %	7 Kali 0 Dokumen 5 Dokumen 3 Kali 1 Kali	100 Persentase	59,752,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produk hukum daerah yang di tetapkan sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	90 %	120,043,900
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah							370,900,500						484,015,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Majo Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolek Ukur	Target	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti peringkat daerah yang terkait	Jumlah Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	1 Kali 4 Dokumen 20 Kali 10 Kali	100 Persentase	370.900.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti peringkat daerah yang terkait	100 %	484.015.500	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							3.841.399.500					5.014.140.900	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							720.326.500						1.110.324.650
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Koordinasi sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang dilaksanakan Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi/pembinaan/bimtek bidang pengelolaan BUMD dan BLUD yang dilaksanakan	Persentase kebijakan strategi bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	2 Dokumen 10 Kali 5 Kali 2 Kali	100 Persentase	232.326.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRB	100 %	405.000.000	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRB	Jumlah Kajian bidang pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi dan konsultasi bidang pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi/Pembinaan bidang Pengendalian dan distribusi Perekonomian yang dilaksanakan	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	0 Dokumen 5 Kali 2 Laporan 5 Kali 2 kali	100 Persentase	227.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRB	100 %	255.324.650	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRE	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Kajian Bidang ekonomi mikro kecil yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi dan konsultasi bidang administrasi perekonomian yang dilaksanakan Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi/pembinaan bidang ekonomi yang dilaksanakan	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	2 Dokumen 0 Dokumen 10 Kali 5 Kali 0 kali	100 Persentase	147.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRE	100 %	150.000.000	
4 01 03 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRE	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Jumlah Kajian Bidang Kebijakan pembentukan BLUD yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi pembentukan BLUD yang dilaksanakan Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi/pembinaan/bimtek bidang pembentukan BLUD yang dilaksanakan	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen 5 Kali 4 Kali 0 kali	100 Persentase	114.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRE	100 %	150.000.000	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							1.161.707.800					1.334.023.750	

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.03.2.02.01	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti perangkat daerah	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	1 kali 0 Dokumen 2 Dokumen 5 Kab 6 Kab 2 Kab	100 Persentase	420.516,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti perangkat daerah	100 %	421,016,400
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti perangkat daerah	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	1 Kab 20 Kali 2 Laporan 15 kali 2 Kab	100 Persentase	463,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti perangkat daerah	100 %	680,752,350
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti perangkat daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	10 kali 4 Laporan 15 kali	100 Persentase	277,381,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti perangkat daerah	100 %	232,255,000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								1,497,491,500					2,044,792,500

Kode	Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks kematangan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Pemberian Honorarium Pengelolaan Barang/jasa Persentase Jumlah Total Proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diindikasikan tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	4 level	2 Dokumen 150 Kali 290 Kali 5 % 25 Nilai rasio	100 Persentase	1,057,316,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kematangan Pengadaan Barang Jasa	4 level	1,550,792,500	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Indeks kematangan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diindikasikan tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	4 level	2 Dokumen 10 Kali	100 Persentase	139,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kematangan Pengadaan Barang Jasa	4 level	155,000,000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks kematangan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Kematangan UKPB mencapai level proaktif	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diindikasikan tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	4 level	20 kali 0 Orang 5 Orang 9 Indikator	100 Persentase	300,570,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kematangan Pengadaan Barang Jasa	4 level	339,000,000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								461,874,500				525,000,000	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Ususan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KURUM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diindikasikan tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	1 Dokumen 5 Laporan	100 Persentase	153,874,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRB	100 %	150,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah hasil Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Pemertasi kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	1 Dokumen 5 Laporan 1 Kali	100 Persentase	98,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRB	100 %	155,000,000
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Jumlah Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi Kebijakan Energi dan Air yang dilaksanakan	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	1 Dokumen 5 laporan 2 Kali	100 Persentase	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan yang mendukung pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap PDRB	100 %	230,000,000
TOTAL									45,997,945,000					58,532,655,000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi tahun 2022 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi 2022 – 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022 memuat strategi dan kebijakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi. Namun demikian kita menyadari bahwa dalam pelaksanaannya sering terjadi ketersediaan dana dengan kebutuhan tidak sesuai, hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas. Maka dari itu pada akhir tahun sering terjadi pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai target yang direncanakan karena terbatasnya dana.

Pada prinsipnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2022 disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergi dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi agar mendukung pencapaian target-target dalam Rencana Kerja tahun 2023 dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat tercapai.
3. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun ke I (pertama) dalam Renstra, yang berfungsi untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan. Dengan demikian Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Kerja secara berkala.

Ngawi, 5 Agustus 2022

The official seal of Kabupaten Ngawi is circular, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'BUPATI KABUPATEN NGAWI'. A handwritten signature in black ink is written over the seal.
BUPATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO